

Laporan Keuangan

Untuk Periode 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN

Jalan M.T. Haryono Nomor 98 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Kode Pos 17320

Telepon: (021) 82602182

E-mail: bpmisp@pertanian.go.id; Website: bpmisp.ditjennak.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Bekasi, 15 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dayat', is written over the official stamp.

Dayat, S.Pt., M.Si.
NIP. 197810182008011010

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

- C.4. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1. Pendapatan Diterima Dimuka
 - C.4.2. Uang Muka dari KPPN
- C.5. Ekuitas
 - C.5.1. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bekasi, 15 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dayat, S.Pt., M.Si.
NIP. 197810182008011010

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.796.548.450,00 atau mencapai 121,4% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.303.479.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp.26.033.429.944,00 atau mencapai 1,775,1 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.466.590.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.162.260.792.668,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.1.093.395.620,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.160.400.171.393,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 767.225.655,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.162.260.792.668,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.746.363.450,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.32.658.095.876,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp.-29.911.732.426,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp.50.185.000,00 dan Defisit Rp.0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp.29.861.547.426,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.173.018.344.043,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (12.531.441.241,00). kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas

sebesar Rp.19.103.996.051,00 sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.162.260.792.668,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A	2.303.479.000,00	2.795.548.450,00	121,4%	26.033.429.944,00
Jumlah Pendapatan		2.303.479.000,00	2.795.548.450,00	121,4%	26.033.429.944,00
BELANJA	B				
Belanja Pegawai	B.1	3.844.990.000,00	3.816.041.597,00	99,25%	2.576.587.250,00
Belanja Barang	B.2	17.588.655.000,00	17.177.750.903,00	97,66%	3.139.992.767,00
Belanja Modal	B.3	906.964.000,00	906.752.001,00	99,98%	22.138.606.000,00
Jumlah Belanja		22.340.609.000,00	21.900.544.501,00	98,03%	25.535.186.017,00

II. NERACA

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	0,00	0,00
Persediaan	C.1.3.	1.093.395.620,00	1.065.456.021,00
Jumlah Aset Lancar		1.093.395.620,00	1.065.456.021,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	60.214.114.000,00	60.214.114.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	98.336.991.154,00	100.363.571.041,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	41.720.724.448,00	42.554.582.448,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	13.411.004.524,00	13.411.004.524,00,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	15.018.800,00	15.018.800,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-53.297.681.533,00	-44.610.402.791,00
Jumlah Aset Tetap		118,679,446,945,00	171.947.888.022,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	5.000.000,00	5.000.000,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2.	0,00	0,00
Aset Lain-lain	C.3.3.	6.077.289.766,00	2.310.099.878,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4.	-5.315.064.111,00	-2.310.099.878,00
Jumlah Aset Lainnya		767.225.655,00	5.000.000,00
Jumlah Aset		162.260.792.668	173.018.344.043
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	0,00	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2.	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.3.	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	162.260.792.668,00	173.018.344.043,00
Jumlah Ekuitas		162.260.792.668,00	173.018.344.043,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		162.260.792.668,00	173.018.344.043,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	2.746.363.450,00	1.543.965.750,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.746.363.450,00	1.543.965.750,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.816.041.597,00	3.333.114.310,00
Beban Persediaan	D.3.	3.132.850.813,00	880.025.536,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.163.185.280,00	2.867.418.801,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.773.923.008,00	816.282.458,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.168.919.689,00	238.318.754,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	7.910.932.514,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	11.692.242.975,00	10.852.086.978,00
JUMLAH BEBAN		32,658,095,876	18,987,246,837
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-29,911,732,426,00	-17,443,281,087,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-29,861,547,426,00	3,684,812,009,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-29,861,547,426,00	3,684,812,009,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1.	173,018,344,043,00	186,492,455,829,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-29,861,547,426,00	3,684,812,009,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	-21,032,489,696,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	19,103,996,051,00	3,873,565,901,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-10,757,551,375,00	-13,474,111,786,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	162,260,792,668,00	173,018,344,043,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/OT.140/05/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan ditetapkan struktur organisasi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan adalah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Pakan Ternak. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 98 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Kode Pos 17320 Telepon 021-82602182 (Hunting); Faksimili 021-82607499; E-mail bpmisp@pertanian.go.id dan Website bpmisp.ditjennak.pertanian.go.id.

BPMSP terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Penyiapan Sampel
- c. Seksi Pelayanan Teknis
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Visi

Menjadi Balai Pengujian yang profesional dalam menjamin pakan bermutu, aman dan tersertifikasi untuk mendukung penyediaan pangan asal ternak.

2. Misi

- (1) Merumuskan hasil pengujian sertifikasi mutu dan keamanan pakan serta benih tanaman pakan ternak
- (2) Melakukan pemantauan, survei mutu dan keamanan pakan
- (3) Melakukan pengembangan teknik dan metode pengujian sesuai permintaan pelanggan dan IPTEK
- (4) Menyelenggarakan uji profisiensi pakan dalam mewujudkan laboratorium rujukan dan acuan
- (5) Meningkatkan jejaring kerja laboratorium pakan
- (6) Melaksanakan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu
- (7) Meningkatkan kualitas pelayanan prima

3. Tujuan

- (1) Meningkatkan jumlah sampel dan sertifikat yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan pakan
- (2) Mengembangkan kemampuan teknik dan metode pengujian dan terakreditasi
- (3) Mewujudkan laboratorium referensi di bidang pengujian pakan ternak
- (4) Mewujudkan layanan yang prima

4. Sasaran Strategi Mencapai Program

Selama lima tahun ke depan (2016-2023), dalam rangka mendukung penyediaan pangan asal ternak yang bermutu, aman dan tersertifikasi, BPMSP Bekasi mencanangkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan teknik pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi
2. Meningkatnya pemantauan dan survei mutu dan keamanan pakan
3. Meningkatnya pelayanan prima untuk kepuasan pelanggan

5. Nilai

Nilai-nilai merupakan pedoman yang diyakini sebagai ketinggian jiwa yang selalu dihayati dan selalu diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan tugas. Nilai yang berkembang menjadi semangat bagi aparatur dalam berkarya dan berkarsa.

Dalam mewujudkan penyediaan pangan asal ternak yang bermutu, aman dan tersertifikasi, BPMSP Bekasi merumuskan nilai-nilai yang dianut untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan tagline “SMART” yaitu :

S - Smile

Pelayanan kami setulus hati

M - Measureable

Metode pengujian kami tertelusur dan terukur dengan standar Internasional

A - Accurate

Hasil pengujian mutu dan keamanan pakan kami tepat dan teliti

R - Responsibility

SDM kami dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab yang memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil dan memiliki integritas yang tinggi dan kompeten dibidang pengujian

T – Timely

Layanan pengujian kami tepat waktu

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
 - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,303,479,000	2,796,548,450,00
Jumlah Pendapatan	2,303,479,000	2,796,548,450,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,893,887,000,00	3,493,015,000,00
Belanja Lembur	157,648,000,00	157,648,000,00
Belanja Barang Operasional	1,596,320,000,00	1,672,842,000,00
Belanja Barang Non Operasional	477,008,000,00	345,130,000,00
Belanja Barang Persediaan	2,612,881,000,00	3,197,226,000,00
Belanja Jasa	1,479,350,000,00	1,148,885,000,00
Belanja Pemeliharaan	1,182,842,000,00	1,740,835,000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,681,744,000,00	1,230,317,000,00
Belanja Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	8,253,420,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Belanja	12,081,680,000,00	19,566,476,000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.757.363.450,00 atau mencapai 117,53% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.2.303.479.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Pendapatan			
425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2,303,479,000,00	2,707,363,450,00	117,53%
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00	0,00
425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0,00	50,000,000	0,00
Jumlah	2,303,479,000,00	2,757,363,450	117,53%

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 89,40% dibandingkan TA 2024. Penurunan disebabkan karena terdapat penurunan pada penerimaan kembali belanja modal TAYL

dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	%
425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2,707,363,450,00	1,541,965,750,00	75,58%
425429 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	0,00	0,00
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	2,350,855,856,00	0,00
425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	50.000.000,00	22.138.608.338,00	-99,77%
Jumlah	2,757,363,450	26,031,429,944,00	-89,40%

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp.21,900,549,716,00 atau 98,03% dari anggaran belanja sebesar Rp.22,340,609,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per-31 Desember 2025

Uraian	2025		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	3.844.990.000,00	3,817,337,357,00	99,28%
Belanja Barang	17,588,655,000,00	17,177,756,118,00	97,66%
Belanja Modal	906,964,000,00	906,752,001,00	99,98%
Total Belanja Kotor	22,340,609,000,00	21,901,845,476,00	98,04%
Pengembalian Belanja	0,00	1,295,760,00	0,00
Total Belanja	22,340,609,000,00	21,900,549,716,00	98,03%

Dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 26,78% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Perubahan realisasi belanja antara Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dipengaruhi oleh tidak adanya belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2025. Pada Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja lebih tinggi karena adanya pembangunan gedung baru, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 belanja modal hanya berupa belanja peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	.%
Belanja Pegawai	3,816,041,597,00	3,333,114,310,00	14,49%
Belanja Barang	17,177,750,903,00	4,435,275,535,00	287,36%

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	.%
Belanja Modal	906,752,001,00	22,138,606,000,00	95,90%
Total Belanja	21,900,544,501,00	29,906,995,845,00	-26,78%

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3,816,041,597,00 dan Rp.3,333,114,310,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 14,49% dari TA 2024. Hal ini disebabkan adanya kenaikan belanja gaji dan tunjangan PNS dan pada tahun anggaran 2025 terdapat pengembalian belanja pegawai yang berasal dari :

1. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS
2. Pengembalian belanja tunjangan fungsional PNS
3. Pengembalian belanja tunjangan umum PNS

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,675,680,357	3,183,884,604,00	15,44%
Belanja Lembur	141,657,000,00	149,231,000,00	-5,07%
Jumlah Belanja Kotor	3,817,337,357	3,333,115,604	14,53%
Pengembalian Belanja Pegawai	1,295,760,00	1,294,00	100,035%
Jumlah Belanja	3,816,041,597	3,333,114,310,00	14,49%

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.17,177,750,903,00 dan Rp. 4,435,275,535,00. Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 287,36% dari TA 2024. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran belanja barang. Adapun rincian kegiatan Belanja Barang dengan tingkat realisasi di atas 100% antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan belanja barang non operasional, dengan realisasi sebesar 5.468,87%, disebabkan oleh belanja bahan dan belanja non operasional lainnya
- Kegiatan belanja barang persediaan dengan realisasi sebesar 489,03%, disebabkan oleh adanya belanja barang konsumsi dan bahan baku
- Kegiatan belanja pemeliharaan, dengan realisasi sebesar 121,01%, disebabkan oleh belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jaringan dan pemeliharaan lainnya
- Kegiatan belanja perjalanan dalam negeri, dengan realisasi sebesar 390,48% disebabkan oleh meningkatnya pelaksanaan perjalanan dinas biasa dalam rangka kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), serta pelaksanaan bimbingan teknis pendampingan distribusi, kegiatan pembinaan, dan monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan program di daerah.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,670,614,786,00	1,902,583,229,00	-12,19%
Belanja Barang Non Operasional	344,034,887,00	6,177,170,00	5.468,87%
Belanja Barang Persediaan	3,195,956,220,00	542,654,586,00	489,03%
Belanja Jasa	1,148,535,607,00	958,658,402,00	19,81%
Belanja Pemeliharaan	1,738,757,200,00	786,883,394,00	121,01%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,168,919,689,00	238,318,754,00	390,48%
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	7,910,932,514,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	17,177,750,903,00	4,435,275,535,00	287,36%
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	17,177,750,903,00	4,435,275,535,00	287,36%

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,635,715,000,00 dan Rp. 22.138.606.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar -92,60% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan karena adanya penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan.

Perbandingan Belanja Modal per-31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 30 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,635,715,000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	22,138,606,000,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1,635,715,000,00	22.138.606.000,00	-92,60%
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1,635,715,000,00	22.138.606.000,00	-92,60%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,093,395,620,00 dan Rp.1.065.456.021,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian saldo persediaan senilai Rp. 1.093.395.620,00 yaitu sebagai berikut:

1. Barang konsumsi, yang terdiri dari:
 - a. Buku tulis
 - b. Alat perekat
 - c. Barang cetakan
 - d. Alat tulis
 - e. Alat tulis kantor lainnya
 - f. Kertas HVS
 - g. Amplop
 - h. Kop surat
 - i. Barang cetakan
 - j. Bahan cetak lainnya
 - k. Tinta/ toner printer
 - l. Persediaan berupa alat penunjang laboratorium
 - m. Persediaan berupa bahan penunjang laboratorium
 - n. Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya
2. Suku cadang, yang terdiri dari:
 - a. Suku cadang alat laboratorium umum
3. Bahan baku, yang terdiri dari:
 - a. Bahan bangunan dan konstruksi lainnya
 - b. Bahan kimia padat
 - c. Bahan kimia cair
 - d. Bahan kimia lainnya
 - e. Bahan lainnya
4. Persediaan lainnya yang terdiri dari :
 - a. Obat cair (persediaan lainnya)

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik (terlampir).

Rincian Persediaan per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	85,210,371,00	165.266.648,00
Suku Cadang	15,726,248,00	61.985.256,00
Bahan Baku	992,459,001,00	1.083.434.105,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	1,093,395,620	1.310.686.009,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.60.214.114.000,00 dan Rp.60.214.114.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.48.902.958.238,00 dan Rp.100.809.552.688,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	101.809.552.688,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.370.063.212,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	3.412.732.634,00
Saldo per 31 Desember 2025	98.396.820.054,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	49,493,861,816,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	48,902,958,238 ,00

Ada mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin karena terjadi salah pemilihan kode barang.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.39.425.582.831,00 dan Rp.42.627.461.048,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	42.627.461.048,00
Mutasi Tambah	
Transaksi Perolehan Lainnya	0,00
Mutasi Kurang	

Reklasifikasi Keluar	833.858.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	41,793,603,048,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	2,368,020,217,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	39,425,582,831,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.13.411.004.524,00 dan Rp.13.411.004.524,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.15.018.800,00 dan Rp.15.018.800,00.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.46.393.557.189,00 dan Rp.-39.458.598.025,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	98,396,820,054,00	49,493,861,816,00	48,902,958,238 ,00
2.	Gedung dan Bangunan	41,793,603,048,00	2,368,020,217,00	39,425,582,831,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13,411,004,524,00	586,059,038,00	13,411,004,524,00
4.	Aset Tetap Lainnya	15,018,800,00	0,00	15,018,800,00.
Akumulasi Penyusutan		111,822,843,378	52,447,941,071	101,754,564,393

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 dan Rp.5.000.000,00. Aset Tak Berwujud adalah Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan aset non-meneter yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki substansi fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5.000.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	5.000.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.000.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.077.289.766,00 dan Rp.2.310.099.878,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2,310,099,878.,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0,00
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	6,077,289,766,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	5,315,064,111,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	762,225,655,00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.5.315.064.111,00 dan Rp-2.310.099.878,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	5,000,000,00	0,00	5.000.000,00
2.	Aset Lain-lain	6,077,289,766,00	5,315,064,111,00	762,225,665,00
Akumulasi Penyusutan		6,082,289,766,00	5,315,064,111,00	767,225,665,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp.291.180.352,00 Utang kepada pihak ketiga ini terdiri dari :

Rincian utang kepada pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang kepada pihak ketiga	0,00	291.180.352,00
Jumlah	0,00	291.180.352,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.169.135.809.334,00 dan Rp.173.018.344.043,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.707.363.450,00 dan Rp. 1,541,965,750,00.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
425289 Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya	2,707,363,450,00	1,541,965,750,00	75,58%
425429 Pendapatan pengembangan sumber daya manusia lainnya	0,00	0,00	0,00
425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2,707,363,450,00	1,541,965,750,00	75,58%

Tidak ada perbedaan data antara realisasi pendapatan pengujian di LO dan di LRA.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,619,434,586,00 dan Rp.3.333.070.604,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,357,942,200,00	2,143,749,100,00	9,99%
Beban Pembulatan Gaji PNS	33,657,00	33,669,00	-0,04%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	182,328,834,00	184,011,760,00	-0,91%
Beban Tunj. Anak PNS	64,120,508,00	61,791,774,00	3,77%
Beban Tunj. Struktural PNS	24,660,000,00	25,200,000,00	-2,14%
Beban Tunj. Fungsional PNS	301,079,000,00	266,770,000,00	12,86%
Beban Tunj. PPh PNS	21,370,147,00	22,053,981,00	-3,10%
Beban Tunj. Beras PNS	146,433,240,00	140,929,320,00	3,91%
Beban Uang Makan PNS	348,286,000,00	311,390,000,00	11,85%
Beban Tunjangan Umum PNS	40,920,000,00	27,910,000,00	46,62%
Beban Uang Lembur	132,261,000,00	149,231,000,00	-11,37
Jumlah	3,619,434,586,00	3,333,070,604,00	8,59%

Belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 8,59% terutama untuk belanja tunjangan umum PNS.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3.132.850.813,00 dan Rp.880,025,536,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	202,432,652,00	204,675,244,00	-1,10%
Beban Persediaan bahan baku	2,930,418,161,00	675,350,292,00	333,86%
Jumlah	3,132,850,813,00	880,025,536,00	256,12%

Beban persediaan bahan baku terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Bahan kimia padat
2. Bahan kimia cair
3. Bahan kimia lainnya
4. Bahan lainnya

Beban persediaan konsumsi terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Alat tulis
2. Penjepit kertas
3. Buku tulis
4. Alat perekat
5. Barang cetakan
6. Alat tulis kantor lainnya
7. Kertas HVS
8. Amplop
9. Kop surat
10. Bahan cetak lainnya
11. Tinta / toner printer
12. Persediaan berupa alat penunjang laboratorium
13. Persediaan berupa bahan penunjang laboratorium
14. Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya

Nilai beban persediaan di Laporan Operasional senilai Rp.3.132.850.813,00 sama dengan nilai Persediaan di Neraca senilai Rp. 3.132.850.813,00,00.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3,163,185,200,00 dan Rp. 2,867,418,801,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	309,236,170,00	392,262,601,00	-21,17%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	222,300,000,00	164,160,000,00	35,42%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,569,628,00	12,149,616,00	-21,24%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,126,929,000,00	1,331,465,000,00	-15,36%
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan	119,302,307,00	5,126,000,00	2.227,40%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	224,732,580,00	3,079,595,00	7.197,47%
Beban Langganan Listrik	885,384,383,00	754,001,309,00	17,42%
Beban Langganan Telepon	4,831,583,00	4,809,604,00	0,46%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	102,705,641,00	116,491,329,00	-11,83%
Beban Sewa	5,994,000,00	4,995,000,00	20%
Beban Jasa Profesi	10,200,000,00	1,000,000,00	920%
Beban Jasa Lainnya	159,420,000,00	77,361,160,00	106,07%
Jumlah	3,163,185,200,00	2,867,418,801	10,31%

Beban barang dan jasa di tahun 2025 mengalami refocusing anggaran.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.706.273.688,00 dan Rp. 816.282.458,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	660,725,258,00	55,551,615,00	1.089,59%

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	974,000,377,00	688,574,529,00	41,45%
Beban Pemeliharaan Jaringan	37,531,565,00	42,757,250,00	-12,22%
Beban Persediaan suku cadang	34,016,488,00	29,399,064,00	15,71%
Jumlah	1,706,273,688	816,282,458	109,02%

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,168,919,689,00 dan Rp. 238,318,754,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1,017,356,361,00	131,443,608,00	673,91%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	46,981,000,00	12,248,282,00	283,59%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	104,582,328,00	94,626,864,00	10,52%
Jumlah	1,168,919,689,00	238,318,754,00	390,47%

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.641.705.202,00 dan Rp. 10.697.698.311,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 September 2025 dan 30 September 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10,047,329,011	9,596,082,126,00	4,70%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	866,922,679,00	864,345,938,00	0,30%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	242,631,812,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	455,021,279,00	236,410,247,00	92,47%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak di Gunakan dalam Operasional Pemerintah	29,800,421	860.000,00	3.364,01%
Jumlah	11,641,705,202	10,697,698,311	8,82%

D.9. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya mencakup antara lain surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya. Jumlah Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.50.185.000,00 dan Rp.0,00. Rincian Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-185.000	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-50.000.000	0,00	0,00
Jumlah	-50.185.000,00	0,00	,00

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya mengalami kenaikan sebesar 100,00% yang berasal dari penerimaan Kembali belanja pegawai tahun yang lalu dan penerimaan Kembali belanja modal tahun yang lalu.

D.9. Surplus/Defisit dari Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
per 30 September 2025 dan 30 September 2024

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	-29,911,095,876,00	-17,443,281,087,00	71,48%
Jumlah	-29,911,095,876,00	-17,443,281,087,00	71,48%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.173.018.344.043 dan Rp. 186.492.455.829,00

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.- 29.861.547.426,00 dan Rp.3.684.812.009,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. -21.032.489.696,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. - 21.032.489.696,00. Koreksi ini berasal dari transaksi yang mengkoreksi aset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.19.103.996.051,00 dan Rp.3.873.565.901,00 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau

lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2025
Ditagihkan ke Entitas Lain	21,900,544,501,00
Diterima dari Entitas Lain	-2,796,548,450
Jumlah	19,103,996,051,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2025 saldo DDEL adalah sebesar Rp.- 2.796.548.458,00 sedangkan DKEL sebesar Rp. 21,900,544,501,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.162.260.792.668,00 dan Rp.173.018.344.043

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Tidak ada